



## PENDAMPINGAN BUMDES BABO DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AUDITABLE DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN

Kuwat Slamet, I Gede Komang  
Chahya Bayu Anta Kusuma, Yadhya  
Cahyady, Darrin Octavia Siski,  
Ishaq Rila Paramudea,  
Darwin Nazrul Mahendra

Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstrak

BUMDes perlu terus didorong untuk menjadi semakin profesional. Salah satu bentuk pengelolaan BUMDes yang baik adalah kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dan memiliki kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Selama ini, BUMDes Bandung Bondowoso (Babo) menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi serta pemenuhan kewajiban perpajakan akibat keterbatasan keterampilan pengelola. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan komprehensif. Metode yang digunakan mencakup tiga tahapan utama, yaitu (1) pelatihan dasar mengenai prinsip akuntansi dan perpajakan, (2) pendampingan implementasi, termasuk pencatatan transaksi menggunakan jurnal khusus dan aplikasi akuntansi sederhana, serta (3) evaluasi hasil, berupa asesmen terhadap laporan keuangan yang telah disusun. Hasil program menunjukkan bahwa BUMDes Babo berhasil menyusun laporan keuangan tahun 2023 yang siap audit serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Keberhasilan ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes, serta membuka peluang akses ke pembiayaan eksternal. Secara jangka panjang, program ini berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan operasional BUMDes, sekaligus menjadi model bagi BUMDes lain dalam penerapan tata kelola keuangan yang baik.

Kata kunci: BUMDes, Laporan Keuangan, Audit, Perpajakan, Pendampingan, Kewajiban Perpajakan

### Abstract

*BUMDes needs to be continuously encouraged to become more professional. One form of good BUMDes management is the ability to prepare financial reports and comply with tax provisions. So far, BUMDes Bandung Bondowoso (Babo) has faced challenges in preparing financial reports that comply with accounting standards and fulfill tax obligations due to limited managerial capabilities. This community service program aims to increase the capacity of BUMDes managers through comprehensive training and mentoring. The methods used include three main stages; (1) basic training in accounting and taxation principles, (2) implementation mentoring, including recording transactions using special journals and simple accounting applications, and (3) evaluation of results, in the form of an assessment of the financial reports that have been prepared. The results of the program show that BUMDes Babo has succeeded in preparing a 2023 financial report that is ready to be audited and reporting its tax obligations on time. This success strengthens the transparency and accountability of BUMDes finances and opens up opportunities for access to external financing. In the long term, this program contributes to increasing the independence and sustainability of BUMDes operations, as well as being a model for other BUMDes in implementing good financial governance.*

Keywords: BUMDes, Financial Report, Audit, Taxation, Mentoring, Tax Obligations

\* Corresponding author  
Kuwat Slamet  
Email: kuwatslamet@pknstan.ac.id

© 2025 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

### PENDAHULUAN Latar Belakang

Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, akses terhadap layanan publik yang lebih baik, dan peningkatan pendapatan (Puasa, et. al., 2018).

BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kerajinan tangan (Ikmaludin, 2024). Selain itu, BUMDes juga membantu meningkatkan pendapatan asli desa melalui berbagai usaha yang dikelola, sehingga desa memiliki sumber pendapatan yang

lebih stabil dan berkelanjutan (Pradana & Fitriyanti, 2019).

Dalam *Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2024* pada tanggal 15 November 2024, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mencatat sebanyak 61.069 BUM Desa, termasuk BUM Desa Bersama, yang telah didirikan di seluruh Indonesia. Namun ia juga menyampaikan bahwa mayoritas BUM Desa belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, yang berdampak pada minimnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana dan operasional BUM Desa.

BUM Desa secara umum menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian di bidang teknologi, sehingga akuntansi masih belum memenuhi regulasi, skala ekonomi yang kecil (Izzalqurny, et. al., 2022) Kurangnya pencatatan keuangan yang baik dapat menyebabkan BUMDes kesulitan dalam mengakses pembiayaan eksternal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana desa.

Pemerintah telah memberikan payung hukum melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mengatur bahwa setiap BUMDes harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar serta memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dalam bentuk pendampingan agar BUMDes dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaannya.

Pendampingan ini berfokus pada peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang *auditable* dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Melalui program ini, diharapkan BUMDes dapat lebih transparan, akuntabel, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

BUMDes dengan tata kelola yang baik, salah satunya, tercermin dari tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk itu, kemampuan untuk membuat

laporan keuangan sangat diperlukan. Ada pun manfaat laporan keuangan bagi BUMDes, yaitu:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.  
Laporan keuangan yang lengkap, jelas dan terstruktur dapat membantu masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya memahami kondisi keuangan BUMDes terkait penggunaan dana dan aset BUMDes.
- b. Membantu mengevaluasi kinerja keuangan secara rutin.  
Laporan keuangan memberikan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, laba atau kerugian yang dihasilkan oleh BUMDes. Dengan mengevaluasi kinerja keuangan secara berkala, BUMDes dapat mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan atau perbaikan yang perlu dilakukan.
- c. Membantu pengurus BUMDes dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan keuangan dan investasi.  
Data keuangan yang terdokumentasi dengan baik akan mempermudah analisis dan pemahaman terhadap kondisi keuangan BUMDes.
- d. Membantu dalam pengajuan pembiayaan dari pihak ketiga.  
Laporan keuangan yang baik akan menjadi syarat penting. Pihak yang memberikan pembiayaan akan menilai keberlanjutan dan kelayakan keuangan BUMDes berdasarkan laporan tersebut.
- e. Memenuhi kewajiban hukum bagi BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Memenuhi kewajiban pembukuan dalam pelaporan pajak.  
Laporan keuangan sebagai lampiran wajib BUMDes pada saat melaporkan kewajiban pajak dengan benar. Menyusun Laporan Keuangan dan kewajiban pelaporan pajak yang tepat akan menghindari masalah hukum dan risiko terkena sanksi perpajakan di masa depan.

Dengan adanya kemampuan menyusun laporan keuangan, BUMDes akan dapat mengelola keuangan mereka secara lebih efektif, transparan, dan profesional. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak lain terhadap BUMDes sebagai entitas ekonomi yang berperan dalam pembangunan desa.

### **BUMDes Bandung Bondowoso (BUMDes Babo)**

Badan Usaha Milik Desa Bandung Bondowoso (BUMDes Babo) merupakan salah satu BUMDes yang berada di Provinsi Jawa Timur dan beberapa kali mendapatkan penghargaan tingkat provinsi. Salah

satu penghargaan yang diterima adalah BUMDes terbaik I kategori BUMDes Cepat Tumbuh Tahun 2023 (Gambar 1). BUMDes ini adalah BUMDes milik desa Sidobandung, kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2017, Desa Sidobandung membentuk sebuah unit usaha simpan pinjam (pembiayaan) sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dengan berbekal kegiatan inventarisasi potensi desa dan peta aset desa melalui forum musyawarah desa, Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Sidobandung akhirnya menyepakati pembentukan BUMDes. BUMDes ini kemudian diberi nama BUMDes Bandung Bondowoso (BUMDes Babo) dengan visi, "Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Menuju Warga Sejahtera". Selanjutnya, pihak pengurus terpilih mengembangkan berbagai usaha yang berpotensi memberikan pemasukan bagi BUMDes. Pada tahun 2021, berasal dari pemupukan modal usaha jasa pembiayaan, minimart (Gambar 2), BUMDes Babo mengembangkan kegiatan usaha berupa wahana dalam wisata air (Gambar 3), dan unit simpan pinjam (pembiayaan).



**Gambar 1.** Penganugerahan BUMDes terbaik tahun 2023 oleh Gubernur Jawa Timur

Saat ini BUMDes Babo telah memiliki 5 (lima) unit usaha, yaitu: Minimart (perdagangan keperluan pokok dan rumah tangga) (Gambar 2), Wisata Air (wisata) (Gambar 3), Simpan Pinjam (Pembiayaan), Pengelolaan Pasar Tradisional, dan Jasa pengelolaan Air Bersih. Unit usaha ini bukan merupakan entitas yang terpisah dari BUMDes. Dengan demikian, entitas pada BUMDes Babo hanya satu, yaitu BUMDes itu sendiri.



**Gambar 2.** Minimarket BUMDes Babo



**Gambar 3.** Wisata Air BUMDes Babo

Sayangnya, keberhasilan demi keberhasilan yang telah dicapai oleh BUMDes Babo belum didukung oleh SDM yang memadai dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Baik pimpinan ataupun staf BUMDes tidak ada yang memiliki latar belakang yang memadai di bidang tersebut. Namun demikian, harus diakui bahwa semangat dan etos kerja pimpinan dan staf BUMDes Babo sangat tinggi. Hal ini tampak dari keseriusan mereka untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang siap audit (*auditable*) dan bahkan keinginan untuk menjadi BUMDes patuh pajak.

### Tujuan dan Manfaat Pengmas

Program Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes Babo dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan siap diaudit (*auditable*) serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Secara khusus, program ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pengurus BUMDes tentang prinsip akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan dan pendampingan.
2. Membantu implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis jurnal khusus dan aplikasi akuntansi sederhana, sehingga laporan keuangan dapat disusun secara sistematis dan sesuai standar.
3. Membantu BUMDes Babo dalam menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peluang mendapatkan pembiayaan eksternal.

Program ini memberikan berbagai manfaat bagi BUMDes Babo, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di antaranya:

1. Tersusunnya laporan keuangan yang siap audit sehingga memungkinkan BUMDes memperoleh opini wajar dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Meningkatkan kepatuhan perpajakan BUMDes, dengan memastikan pelaporan SPT Tahunan dilakukan tepat waktu dan sesuai regulasi.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.
4. Menjadi *role model* bagi BUMDes lain dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.
5. Membantu BUMDes dalam mengakses sumber pendanaan eksternal, baik dari perbankan maupun mitra strategis lainnya.

Dengan keberhasilan program ini, diharapkan lebih banyak BUMDes yang dapat menerapkan sistem keuangan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Menurut Fridson dan Alvares (2022) laporan keuangan yang disusun dengan baik memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana perusahaan. Laporan keuangan juga menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, seperti investasi, pembiayaan, dan operasional. Kieso et al. (2020) menegaskan bahwa laporan keuangan memberikan informasi penting untuk perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Selain itu, melalui laporan keuangan, perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Brigham dan Houston (2019) menekankan bahwa analisis laporan keuangan adalah alat penting dalam menilai profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas perusahaan.

Di sisi lain, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban bagi wajib pajak badan yang memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan dan transparansi pajak. SPT Tahunan memberikan informasi menyeluruh tentang penghasilan, pengeluaran, serta kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh badan usaha dalam satu tahun pajak. Dengan melaporkan SPT Tahunan, BUMDes dapat memastikan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi administratif maupun pidana yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan membantu pemerintah dalam menghimpun data yang akurat mengenai pendapatan nasional, yang berguna untuk merancang kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih efektif.

*Trust* dalam konteks perpajakan mencakup kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, pemerintah, dan otoritas pajak. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan perlakuan yang adil dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan (Safitri dan Jaeni, 2023). Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung

jawab moral badan usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) ini dilaksanakan di BUMDes Bandung Bondowoso (BUMDes Babo), yang berlokasi di Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. BUMDes ini telah menunjukkan perkembangan yang pesat sejak didirikan pada tahun 2017 dan memperoleh penghargaan sebagai BUMDes Terbaik I dalam kategori BUMDes Cepat Tumbuh Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, BUMDes Babo mengelola lima unit usaha, yaitu wisata air, minimart, simpan pinjam, pengelolaan pasar tradisional, dan jasa pengelolaan air bersih. Meskipun mengalami pertumbuhan yang pesat, BUMDes ini menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta memenuhi kewajiban perpajakan.

Program ini dilaksanakan selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2024. Kegiatan dilakukan secara bertahap, mencakup pelatihan, pendampingan implementasi, dan evaluasi hasil.

Program ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kondisi awal BUMDes Babo melalui wawancara dengan pengurus serta analisis dokumen keuangan yang telah ada.
2. Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan. Pada tahap ini tim memberikan materi tentang pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan berbasis jurnal khusus, serta prosedur pelaporan pajak.
3. Pendampingan Implementasi. Pada tahap ini tim mengawasi dan membimbing pengurus dalam mencatat transaksi secara harian serta menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi berbasis Excel.
4. Evaluasi dan Umpan Balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas laporan keuangan yang dihasilkan, memastikan kepatuhan pajak, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk keberlanjutan program.

Adapun keberhasilan program ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Tersusunnya laporan keuangan tahun 2023 yang *auditable* dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Terlaksananya pelaporan SPT Tahunan BUMDes Babo untuk tahun pajak 2023 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDes mengenai pencatatan transaksi dan kepatuhan perpajakan, yang dinilai melalui *pre-test* dan *post-test* selama pelatihan.

4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi BUMDes, yang diukur berdasarkan respons dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah desa.

Dengan pendekatan yang sistematis ini, program diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi BUMDes Babo dalam menerapkan tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

### Proses Kegiatan Pendampingan

Pendampingan dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu Tahap I (Triwulan IV 2023) berupa kegiatan Analisis dan Persiapan; dan Tahap II (Triwulan I 2024) berupa kegiatan Implementasi dan Evaluasi. Pada pendampingan tahap I tim memberikan banyak masukan kepada pengurus BUMDes Babo, diantaranya terhadap dokumen permanen BUMDes, terhadap perbaikan proses bisnis berupa *standard operating procedures* (SOP), terhadap mekanisme pencatatan transaksi keuangan, dan terhadap sistem akuntansi yang sederhana namun dapat mengintegrasikan seluruh pembukuan unit usaha.

Khusus terkait penyusunan laporan keuangan, setelah menganalisis proses bisnis dari kelima unit usaha, tim mengusulkan untuk membuat buku pembantu kas pada tiap-tiap unit usaha. Buku pembantu kas ini dibuat dalam bentuk buku jurnal khusus (*special journal*). Format buku jurnal khusus di setiap unit usaha tidak sama. Format disesuaikan dengan jenis transaksi yang ada di unit usaha yang bersangkutan.

Pemilihan buku pembantu jenis ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia pada BUMDes Babo. Selain itu, tim juga menyarankan agar pembukuan yang selama ini dilakukan secara manual (tulis tangan), mulai dilakukan penginputan secara bertahap ke dalam buku jurnal khusus yang dibuat dalam bentuk file microsoft excel. Dikarenakan faktor sumber daya manusia, maka diputuskan untuk mempertahankan pola pembukuan *manual* dengan diiringi penginputan pada buku jurnal khusus secara berkala.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah dibahas bersama pengurus BUMDes Babo, tim tidak menyarankan tiap-tiap unit usaha untuk mencatat setiap transaksi keuangannya secara langsung ke dalam aplikasi akuntansi excel. Pencatatan melalui buku pembantu kas (buku jurnal khusus) dipandang lebih memberikan kemudahan bagi pengurus tiap-tiap unit usaha (Gambar 4). Selanjutnya, pada akhir bulan, direktur utama (dirut) Bumdes Babo-lah yang akan memindahbukukan transaksi keuangan pada tiap-tiap unit usaha ke dalam aplikasi akuntansi excel

(Gambar 5). Pemindahbukuan dilakukan dengan membuat jurnal pencatatan pada aplikasi akuntansi excel berdasarkan data akun dan saldo akun yang ada pada tiap-tiap buku jurnal khusus.

Gambar 4. Contoh buku pembantu kas (buku jurnal khusus) unit usaha minimart yang telah dilakukan penginputan



Gambar 5. Tampilan aplikasi akuntansi berbasis excel karya Andy P. Hamzah, Dosen PKN STAN

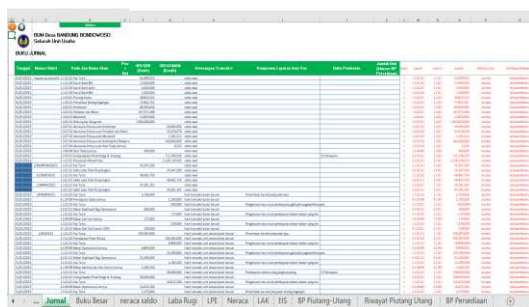
Guna melengkapi penyusunan laporan keuangan, tim menyarankan setiap unit usaha membuat daftar aset tetap yang menjadi tanggung jawab setiap unit. Daftar aset tetap dari masing-masing unit usaha ini nantinya digabungkan menjadi daftar aset tetap BUMDes Babo. Khusus pada unit usaha simpan pinjam (pembiayaan), tim menyarankan agar dibuat daftar peminjam (debitur); pada unit usaha layanan PAM, agar dibuat daftar pelanggan; dan pada unit usaha layanan pasar, agar dibuat daftar penyewa.

Pada pendampingan tahap II, tim memastikan kembali bahwa semua transaksi keuangan yang dicatat pada buku pembantu kas dan pada aplikasi akuntansi excel telah dicatat dengan benar. Beberapa transaksi yang belum dicatat, khususnya transaksi keuangan bulan Desember 2023, pencatatan ke dalam buku pembantu dan aplikasi akuntansi excel mendapat pendampingan langsung dari tim secara luring. Selain itu, tim juga memastikan bahwa seluruh bukti-bukti transaksi telah diarsipkan dengan baik oleh pengurus BUMDes.

Tim melakukan pengecekan data transaksi keuangan yang telah diinput ke dalam buku pembantu kas dari masing-masing unit usaha. Tim melakukan pencocokan data saldo awal dan saldo

akhir tiap akhir bulan dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dengan benar. Seluruh proses ini dilakukan dengan melakukan dialog langsung bersama masing-masing penanggung jawab uni usaha. Selain pembukuan pada buku pembantu kas, tim juga mengecek kelengkapan dan kebenaran penyusunan SPO pokok BUMDes.

Selanjutnya, tim melakukan pengecekan pada aplikasi akuntansi excel untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan pada buku pembantu kas unit usaha telah dipindahbukukan dengan benar (Gambar 6). Atas beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan, tim melakukan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada direktur utama BUMDes selaku penanggung jawab penginputan aplikasi akuntansi excel.



**Gambar 6.** Tampilan jurnal pencatatan pada aplikasi akuntansi excel

Sebelumnya, tim memastikan bahwa setiap saldo awal yang diinput ke dalam aplikasi akuntansi excel telah sesuai dengan laporan keuangan tahun 2022. Beberapa perbedaan yang ditemukan oleh tim, langsung mendapat tanggapan dari pengurus BUMDes dan langsung pula dilakukan perbaikan dalam aplikasi tersebut. Pengecekan selanjutnya adalah data hasil pemindahbukuan dari buku pembantu kas masing-masing unit usaha yang diinput ke dalam aplikasi akuntansi excel. Tim melakukan pengecekan satu-per satu (yang merupakan transaksi pemindahbukuan bulanan).

Secara simultan, tim juga melakukan pengecekan atas daftar aset tetap yang telah dibuat oleh masing-masing penanggung jawab unit usaha. Daftar aset tetap ini tidak hanya berisikan data nama-nama aset tetap, melainkan juga berisikan kelompok jenis aset (d disesuaikan dengan ketentuan perpajakan), tanggal perolehan, nilai perolehan, taksiran masa manfaat (d disesuaikan dengan ketentuan perpajakan), nilai akumulasi penyusutan tahun lalu, nilai penyusutan tahun berjalan, nilai akumulasi penyusutan tahun berjalan, nilai buku, lokasi aset, dan keterangan.

### Laporan Keuangan BUMDes Babo Tahun 2023

Melalui proses yang cukup panjang dan menantang akhirnya BUMDes Babo berhasil menyusun laporan keuangan tahun 2023 sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Selain itu, kini BUMDes Babo telah pula memiliki daftar aset tetap yang akurat yang ada di tiap-tiap unit usaha. Dengan demikian, BUMDes Babo telah memiliki laporan keuangan tahun 2023 yang siap untuk dilakukan pengauditan (*auditable*) oleh auditor eksternal, dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), guna mendapatkan opini atas laporan keuangan (Gambar 7).

| BUM Desa BANDUNG BONDOWOSO<br>Seluruh Unit Usaha<br>LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)<br>Per 31 Desember 2023 dan 2022<br>(dalam rupiah) |        |      |                          |                       |
|---|--------|------|--------------------------|-----------------------|
| No  | Uraian | 2023 | 2022                     |                       |
| 1   | 1.0.01 | 1    | ASET                     |                       |
| 2   | 1.1.01 | 2    | Aset Lancar              |                       |
| 3   | 1.1.01 | 3    | Kas                      | Rp 189.522.372        |
| 4   | 1.1.02 | 4    | Setara Kas               | Rp -                  |
| 5   | 1.1.03 | 5    | Piutang                  | Rp 27.964.343         |
| 6   | 1.1.04 | 6    | Penyisihan Piutang       | Rp -                  |
| 7   | 1.1.05 | 7    | Persediaan               | Rp 93.519.782         |
| 8   | 1.1.06 | 8    | Perengkapan              | Rp 3.068.000          |
| 9   | 1.1.07 | 9    | Pembayaran Dimuka        | Rp -                  |
| 10  | 1.1.08 | 10   | Aset Lancar Lainnya      | Rp -                  |
| 11  | 1.1.09 | 11   | Rik Unit Usaha           | Rp -                  |
| 12  |        | 12   | <b>Total Aset Lancar</b> | <b>Rp 314.084.497</b> |
| 13  |        | 13   |                          |                       |
| 14  | 1.2.00 | 14   | Investasi                | Rp -                  |
| 15  | 1.2.01 | 15   | Investasi                | Rp -                  |
| 16  |        | 16   | <b>Total Investasi</b>   | <b>Rp -</b>           |
| 17  |        | 17   |                          |                       |
| 18  | 1.3.00 | 18   | Aset Tetap               | Rp -                  |
| 19  | 1.3.01 | 19   | Tanah                    | Rp -                  |

**Gambar 7.** Hasil tangkapan layar neraca BUMDes Babo Tahun 2023 yang disusun menggunakan aplikasi akuntansi BUMDes

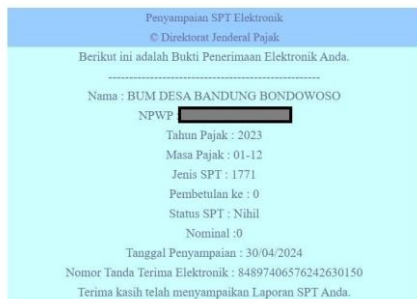
### Pelaporan SPT Tahunan BUMDes Babo

Setelah laporan keuangan tahun 2023 berhasil disusun, upaya pendampingan lainnya adalah membantu BUMDes dalam melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2023. Proses ini diawali dengan pengajuan EFIN ke KPP Bojonegoro oleh Direktur Utama BUMDes Babo.

Setelah mendapatkan nomor EFIN, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan akun DJP *online* BUMDes Babo. Pengaktifan oleh pengurus BUMDes ini dipandu langsung oleh tim agar tidak terjadi kesalahan dalam proses aktivasi akun. Saat akun telah aktif, pengurus BUMDes mengunduh *e-Form* SPT Tahunan yang berupa *file pdf*. Pengisian *e-Form* SPT Tahunan dilakukan oleh tim mengingat kolom isian yang sangat banyak dan pengisian ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang perpajakan.

Setelah proses pengiriman SPT Tahunan berhasil dilakukan, aplikasi DJP *online* akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik (BPE). Penerimaan BPE ini merupakan keluaran akhir dari rangkaian proses

pendampingan SPT Tahunan BUMDes Babo untuk tahun pajak 2023 (Gambar 8).



**Gambar 8.** Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan BUMDes Babo Tahun Pajak 2023

### Hasil dan Dampak Pendampingan

Program ini menghasilkan dampak positif yang terukur, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut:

1. Sebanyak 5 dari 6 orang pengurus inti BUMDes (83,33%) berhasil menyusun laporan keuangan dengan benar, dibandingkan hanya 33,33% sebelum program dilaksanakan.
2. 100% transaksi keuangan BUMDes tahun 2023 telah terdokumentasi dalam jurnal khusus dan aplikasi Excel.
3. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2023 telah berhasil dilaporkan tepat waktu, menghindari BUMDes dari potensi denda keterlambatan dan ketidakpatuhan.
4. Dokumentasi keuangan BUMDes meningkat kurang lebih sebesar 95% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan adanya SOP baru terkait tata kelola keuangan.

Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Dukungan penuh dari pengurus BUMDes dan kepala desa, yang berkomitmen menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan.
2. Metode pendampingan berbasis praktik langsung, yang memungkinkan peserta memahami materi dengan lebih mudah dibandingkan hanya teori.
3. Aplikasi akuntansi berbasis Excel yang sederhana, memudahkan pencatatan transaksi tanpa perlu perangkat lunak mahal.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, yaitu:

1. Keterbatasan literasi akuntansi pengurus BUMDes, sehingga perlu dilakukan pelatihan secara bertahap.
2. Keterbatasan waktu pengurus dalam melakukan pencatatan transaksi, karena masih harus menjalankan operasional usaha sehari-hari dan

pekerjaan lain di luar sebagai pengurus inti BUMDes.

Program ini tidak hanya berdampak pada BUMDes Babo, tetapi juga dapat menjadi model bagi BUMDes lain di Indonesia. Dengan adanya sistem keuangan yang lebih baik, BUMDes dapat lebih mudah mengakses pembiayaan eksternal, meningkatkan profitabilitas, menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan pandangan La Suhu et. al. (2020) yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana hasil usaha BUMDes digunakan.

### KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes Babo dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Tujuan ini telah tercapai melalui serangkaian pelatihan, pendampingan implementasi, dan evaluasi, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan BUMDes.

Hasil program menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Babo kini telah mampu menyusun laporan keuangan tahun 2023 secara mandiri dan sesuai standar, serta berhasil melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu. Selain itu, pengurus telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pencatatan transaksi dan tata kelola keuangan, yang diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Keberhasilan program ini memberikan dampak luas bagi BUMDes Babo, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, BUMDes kini memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi, akuntabel, dan dapat diaudit, sehingga meningkatkan transparansi keuangan dan kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, BUMDes Babo kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sumber pembiayaan eksternal dari perbankan atau lembaga lainnya, yang dapat mendukung ekspansi usaha mereka.

Selain itu, program ini juga dapat menjadi *role model* bagi BUMDes lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan sistem pendampingan berbasis edukasi dan teknologi sederhana (Excel), pendekatan ini dapat direplikasi dengan mudah di berbagai daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan program seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa semakin banyak BUMDes

yang mampu mengelola keuangan mereka secara profesional.

Perguruan tinggi sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan kepada BUMDes dan desa-desa lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha harus terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program penguatan tata kelola keuangan BUMDes di masa depan.

#### PUSTAKA

- Azizah, Nurul., Kusnoto Margi A., Nurafifah, Nurul., Dhewi Deasyanti A., Mais, Rimi G. (2024). Analisis implementasi SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Sustainable Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 4 Nomor 2. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i2.25017>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Fridson, M. S., & Alvarez, F. (2022). *Financial statement analysis: a practitioner's guide*. John Wiley & Sons.
- Ikmaludin, M. N. (2024). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(01).
- Izzalqurny, T. R., Shobah, N., & Rohmah, L. F. (2022). Menguak Penerapan Akuntansi pada BUM Desa di Indonesia. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 77-86.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley & Sons.
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan percepatan perkembangan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133-146.
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2018). *Fundamentals of corporate finance: 2024 Release* ISE. McGraw-Hill.
- Safitri, E., & Jaeni. (2023) Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. Vol 14 No.03. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65182>